

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN INOVASI TECHNOPARK DI KABUPATEN BANTAENG

Reski Elvira R¹, Fatmawati², Abdi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
e-mail: relvira@gmail.com

Abstract

This study aimed to explain the role of the government in developing technopark innovations in Bantaeng Regency. The identification process was carried out by documentation, interviews and direct observation through qualitative methods. The theory used by researcher in analyzing the government's role in developing technopark innovation was using the theory proposed by La Pas and Seo (2009) with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and conclusion making. The results of this study showed that the Government's Role in Developing Technopark Innovations in Bantaeng Regency which included 1) Needs and Solutions, 2) Production and Commercialization Development, 3) ICT Learning, 4) Market Creation and Regulation, was not yet optimal due to several related UPTDs. with the technopark not working properly as a result of the lack of human resources and the procurement of tools and materials that were not equivalent to the existing local government budget.

Keywords: Innovation, Role of Government, Technopark.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran pemerintah dalam mengembangkan inovasi technopark yang ada di Kabupaten Bantaeng Proses identifikasi dilakukan dengan dokumentasi, wawancara serta observasi secara langsung melalui metode kualitatif. Teori yang digunakan peneliti dalam menganalisa peran pemerintah dalam mengembangkan inovasi technopark adalah menggunakan teori yang dikemukakan oleh La Pas dan Seo (2009) dengan teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Mengembangkan Inovasi Technopark di Kabupaten Bantaeng yang meliputi 1) Kebutuhan dan Solusi, 2) Pengembangan Produksi dan Komersialisasi, 3) Pembelajaran TIK, 4) Penciptaan Pasar dan Regulasi, belum terlalu optimal karena adanya beberapa UPTD yang terkait dengan technopark tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat dari kurangnya SDM serta pengadaan alat dan bahan yang tidak setara dengan anggaran pemerintah daerah yang ada.

Kata Kunci: Inovasi, Peran Pemerintah, Technopark.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat sebuah inisiatif yang disebut Bandung *High Tech Valley* (BHTV) pada tahun 2006 yang didirikan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) yang merupakan langkah awal berkembangnya technopark di Indonesia. Kemudian di ikuti berbagai daerah yang ada di Indonesia salah satunya Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu

daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor agroindustri sehingga menjadi pusat lokasi sentra penanaman dan pengembangan technopark oleh nawacita Presiden RI pada tahun 2015 dimana technopark Bantaeng merupakan bagian dari pengembangan 100 technopark di seluruh wilayah Indonesia sebagai program prioritas nasional. Untuk memperkuat dan mewujudkan technopark Bantaeng dengan visi menjadikan sebagai pusat benih unggulan

nasional maka, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi bersama Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan addendum perjanjian kerjasama.

BPPT sebagai lembaga pengkajian terap teknologi telah melakukan pendampingan pada technopark di Kabupaten Bantaeng dan termuat di RPJMN tahun 2015-2019 sesuai dengan Keputusan Peraturan Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Salah satu cara yang dianggap efektif dan terbukti berhasil di banyak negara dalam menggerakkan inovasi dan mendorong hingga terciptanya produk-produk yang memiliki daya saing serta dapat melahirkan usaha kecil menengah yang tangguh dan berbasis inovasi yaitu dengan menghadirkan *technopark*. Technology Park atau *Science Park* yang selanjutnya disebut STP adalah suatu kawasan atau wilayah terpadu dengan penggabungan dunia industri, pusat riset dan pelatihan, perbankan, perguruan tinggi, kewirausahaan, pemerintah pusat dan daerah, dalam satu lokasi yang dapat memberikan dampak terhadap arus informasi dan teknologi secara lebih efektif dan efisien, Meutia (2017)

Technopark Bantaeng sebagai sentra perbenihan menerapkan sebuah pengembangan kawasan technopark dengan zona terkoneksi yaitu kawasan diperbenihan berada pada beberapa wilayah atau lokasi yang terpisah akan tetapi saling terkoneksi. Adapun zona atau lokasi yang memproduksi benih mayoritas diusahakan dan dimiliki oleh masyarakat setempat itu sendiri (petani). Zona tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu zona budidaya atas, tengah dan bawah yang mempunyai agroklimat yang berbeda-beda sehingga benih yang akan dikembangkan mempunyai kesesuaian dengan zona yang telah ada.

Technopark untuk pemerintah daerah itu sendiri khususnya Kabupaten Bantaeng diciptakan untuk lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan daerah sedangkan bagi para pekerja yang pendapatan lumayan cukup,

technopark memiliki daya tarik tersendiri karena situasi, lokasi dan *lifestyle*. Sinergi yang terbangun antara akademisi, pemerintah dan pebisnis akan berdampak pada perputaran roda ekonomi nasional dibidang informasi dan komunikasi dapat bergerak secara dinamis, dengan *technopark* ini juga menjadi langkah percepatan dalam pertumbuhan sebuah ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan teknologi, Haerani (2015).

Pola optimum untuk Indonesia pada tahap awal pengembangan adalah model *triple helix* yang menjadikan pemerintah sebagai unsur dominan yang memiliki peranan penting. Model ini adalah inisiatif dari ilmuwan dan peneliti (*bottom-up*) yang mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah (*top-down*) untuk bersama menarik pihak industri dalam mengembangkan produk baru yang inovatif sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan. Namun konsep Triple helix dianggap kurang jika diterapkan pada technopark Bantaeng sehingga diganti dengan Quadruple Helix Model (A, B, G, C). Konsep QH adalah model pengembangan dari *Triple Helix* dengan pihak keempat yang beragam seperti manajer peningkatan pendidikan dan kewirausahaan. Ribernik (2009).

Barton (2000) menyebutkan bahwa peran pemerintah yang paling utama secara garis besar adalah peran alokasi sumber daya, peran regulator, peran kesejahteraan sosial dan peran mengelola ekonomi makro. Dari keempat peran tersebut menjadi alasan mengapa pemerintah harus mendorong dan mendukung penciptaan serta penguatan kawasan berbasis teknologi di daerah yang berbasis kepada produk unggulannya masing-masing. Karna pada dasarnya konsep pengembangan inovasi technopark menjadi jalan untuk menggaet para investor asing untuk masuk dan bekerja sama dengan baik

Pengembangan *technopark* sebagai kawasan terpadu tidak hanya memanfaatkan SDA yang ada. Akan tetapi juga melakukan pengembangan terhadap sumber daya

manusianya. Sekarang ini banyak sekali sumber daya alam yang tersedia di setiap wilayah Indonesia dan sebagian masyarakat telah memanfaatkan SDA tersebut kemudian dijadikan usaha seperti umbi-umbian yang dijadikan keripik dll. Adapun hasil usaha tersebut digunakan sebagai penunjang perekonomian serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, usaha yang dijalankan masyarakat di daerah-daerah sedikit banyaknya mengalami hambatan seperti kurangnya teknologi yang memadai untuk memasarkan produk, banyaknya pesaing dengan usaha yang sama, kurangnya inovasi dari produk yang dihasilkan sehingga mengakibatkan rendahnya minat konsumen untuk sekadar membeli produk tersebut. Hambatan lainnya adalah karena kurangnya tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat untuk memberdayakan sumber daya alam yang ada menjadi penyebab terhambatnya inovasi yang dapat dihasilkan.

Peran pemerintah tentunya sangat diperlukan dalam mengelola dan membangun serta mengedukasi masyarakat melalui technopark yang berbasis teknologi tersebut, sehingga dapat berdampak baik bagi wilayah yang menerapkan technopark ini

Pranadaja (2003:24). Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum dari UU pada wilayah tertentu melalui sebuah keputusan. Istilah ini berasal dari Pemerintah atau perintah, yang berarti kata yang bermaksud untuk melakukan sesuatu serta wajib dilakukan. Pemerintah merupakan orang, badan atau aparat yang memberi perintah.

Soerjono Soekanto (2002: 243) Peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, sehingga seseorang tersebut telah menjalankan satu peran.

Suwarno (2008) mendefinisikan inovasi yang memiliki hubungan dengan kreativitas adalah: Inovasi atau innovation dari kata to innovate memiliki arti membuat perubahan atau

mengenalkan suatu yang baru.

Peran mampu dilakukan oleh siapa saja termasuk dalam hal ini adalah pemerintah. Seperti halnya pada dewasa ini yang bisa dikatakan bahwa tidak ada negara yang dapat melakukan aktivitas ekonominya terlepas dari campur tangan pemerintah. Pada masa merkantilisme dimana pemerintah cukup berperan dominan namun mengalami beberapa kegagalan mengakibatkan lahirnya teori klasik Smith.

Pera yang semakin besar dari pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kegagalan pasar yang kemudian menjadi awal mula dirasa perlu adanya campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar adalah syarat yang perlu (*necessary condition*) untuk campur tangan pemerintah. Barton (2000) menyebutkan juga bahwa ekonomi pasar yang dipegang oleh pemerintah dipilih secara demokratis, sehingga pemerintah untuk masuk ke dalam aktivitas masyarakat hanya memiliki dua alasan, yaitu social equity dan kegagalan pasar.

Pemerintah juga terdiri dari lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab membuat keputusan kolektif untuk masyarakat, atau dengan kata lain dalam arti sempit pengertian pemerintah berfokus pada tingkatan paling atas dalam lembaga-lembaga tersebut. Pemerintah dalam popular hanya pada tingkat tertinggi lembaga politik yang dimaksud seperti Presiden, Perdana Menteri dan Anggota Kabinet. Dalam arti luas, pemerintah berasal dari semua organisasi yang berwenang dalam mencapai dan melaksanakan keputusan kepada masyarakat atau melayani kepentingan publik. Barton (2000) menyebutkan bahwa peran pemerintah yang paling utama secara garis besar adalah: 1) Peran Alokasi Sumber Daya. 2) Peran Regulator. 3) Peran Kesejahteraan Sosial. 4) Peran Mengelola Ekonomi Makro.

Disisi lain hasil studi *La Paz* dan *Seo* (2009) juga berhasil mengemukakan 4 peranan para actor inovasi termasuk pemerintah dalam pengembangan inovai technopark, yakni: 1) Mendeteksi kebutuhan dan solusi. 2) Pengembangan, produksi dan komersialisasi. 3)

Pembelajaran TIK. 4) Penciptaan pasar dan regulasi

Penggunaan *study La Paz* dan *Seo* lebih memfokuskan pada peran para aktor inovasi termasuk pemerintah dalam mengembangkan inovasi technopark dimana pemerintah harus mendorong dan mendukung penciptaan pasar serta penguatan kawasan berbasis teknologi di daerah yang berbasis kepada produk unggulan masing-masing karna pada dasarnya konsep pengembangan inovasi technopark menjadi jalan untuk menggaet para investor asing untuk masuk dan bekerja sama dengan baik

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, peran pemerintah dengan *public policy* nya secara garis besar adalah mengoreksi kegagalan pasar untuk kemudian memperbaiki tingkat efisiensi produksi serta alokasi sumber daya dan barang, dan merelokasi keuntungan atau oportunitas barang sehingga mencapai target nilai distribusional dan nilai-nilai lainnya dengan tetap memperhatikan perannya dalam mengembangkan suatu inovasi termasuk pengembangan technopark ini.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengembangan inovasi *technopark* di Kabupaten Bantaeng. Pilihan penelitian di Kabupaten Bantaeng dikarenakan Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang menjadi bagian dari nawacita presiden dalam penerapan technopark.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif. Penentuan informan peneliti menggunakan metode peneliti *purposive sampling* yaitu penentuan orang yang mengerti dan terlibat langsung dianggap mengetahui technopark. Data penelitian ini di kumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik dan waktu

kemudian di analisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak ± 120 km arah Selatan Makassar pada koordinat antara $5^{\circ} 21' 13''$ sampai $5^{\circ} 35' 26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 51' 42''$ sampai $120^{\circ} 05' 27''$ Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak pada daerah pantai yang memanjang di bagian antara barat dan timur sejauh 21,5 kilo meter dimana hal ini membuat Kabupaten Bantaeng berpotensi dalam mengembangkan perikanan dan rumput laut. Pada bagian utara terdapat dataran tinggi yang mencakup pegunungan Lompobattang dan bagian selatan yang membujur dari barat ke timur dengan dataran rendah meliputi pesisir persawahan dan pantai.

Kabupaten Bantaeng yang memiliki luas wilayah daratan mencapai 395,83 km² sedang luas wilayah perairan mencapai 144 km². daerah pesisir 59,33 km² atau sekitar 14,99% dengan kemiringan 0-2 m. daratan yang landai 168,75 km² atau sekitar 42,64% dengan kemiringan 2-15 m. Daratan 81,86 km² atau sekitar 20,68% dengan kemiringan 15-40 m. Sedangkan 83,80 km² atau sekitar 21,17% sisanya merupakan daerah daratan dengan kemiringan lebih dari 40 m. Dengan capaian 0,63% dari luas pulau Sulawesi Selatan masih mempunyai potensi alam yang dapat dikembangkan lebih lanjut meskipun terbilang kecil dari kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan.

Salah satunya, di Kabupaten Bantaeng terdapat hutan produksi terbatas dan hutan lindung yang secara keseluruhan luas kawasan tersebut menurut fungsinya sebesar 6.222 Ha pada tahun 2006. Adapun batas wilayahnya yaitu: 1) Sebelah Barat dibatasi dengan Kabupaten Jeneponto, 2) Sebelah Timur dibatasi dengan Kabupaten Bulukumba, 3) Sebelah Utara dibatasi dengan Kabupaten Gowa dan Bulukumba, 4) Sebelah Selatan dibatasi dengan Laut Flores.

Pengembangan technopark di Kabupaten

Bantaeng memiliki visi dan misi menjadi pusat benih yang unggul dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur tahun 2019. Visi ini mengandung makna dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bantaeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bagian selatan Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD tahun 2013-2018 dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki akan mengembangkan *technopark* sebagai pusat benih unggul dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur.

Peran pemerintah dalam pengembangan inovasi *technopark* di Kabupaten Bantaeng akan di analisis oleh peneliti dengan menggunakan teori *La Paz* dan *Seo* (2009) yang mengemukakan peran aktor inovasi termasuk pemerintah yang meliputi mendeteksi kebutuhan dan solusi, pengembangan produksi dan komersialisasi, pembelajaran TIK serta penciptaan Pasar dan Regulasi.

Maka dari penelitian ini diperoleh hasil yang dilakukan oleh peneliti yang kemudian di olah dan dianalisis sehingga timbul beberapa pertanyaan dengan melakukan metode wawancara kepada beberapa informan yang ditentukan oleh peneliti melalui observasi langsung ke lokasi peneliti. Berikut penjelasan secara rinci dari fokus penelitian.

Kebutuhan dan solusi

Mendeteksi kebutuhan dan solusi dalam pengembangan inovasi *technopark* sangat diperlukan untuk menunjang pengembangan yang sedang dilakukan baik kepada masyarakat maupun kepada wirausaha baru. dalam pemenuhan kebutuhan terkait pengembangan *technopark* di kabupaten Bantaeng pemerintah harus memperhatikan beberapa hal dalam pengadaan alat dan bahan termasuk bahan baku utama seperti pengadaan benih. Benih merupakan bahan baku utama yang diperlukan dalam pengembangan inovasi *technopark* di Bantaeng. Untuk itu pemerintah harus berperan dalam mengidentifikasi beberapa hal seperti mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat serta mendata masyarakat yang membutuhkan,

untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang ada di atas maka pemerintah harus memberikan solusi terhadap peran yang dijalankan dalam pengembangan inovasi tersebut seperti penyaluran bantuan sesuai dengan analisis kebutuhan misalnya sesuai dengan jumlah bibit yang disalurkan serta kelompok sasaran yang mendapat bantuan.

Technopark yang ada di Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan bahwa dalam pemenuhan dan pendeteksian kebutuhan dan solusi tergantung kepada kebutuhan dan solusi dinas yang terkait karna di *technopark* Bantaeng sendiri melibatkan beberapa Dinas dan Badan sebagai unit pelaksana tugas harian. Adapun dinas dan badan yang terkait yaitu: 1) Dinas Pertanian, 2) Dinas Koperasi dan Perdagangan, 3) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 4) Dinas Perikanan dan Kelautan, 5) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Pengembangan, Produksi dan Komersialisasi

Pengembangan, produksi dan komersialisasi merupakan bagian yang penting dalam *technopark*. Pengembangan dilakukan untuk menemukan inovasi baru dalam *technopark* sedangkan produksi dilakukan untuk menambah nilai guna dari pengembangan hasil inovasi yang kemudian produk tersebut dilepas untuk dikomersilkan dalam penelitian ini pengembangan lebih difokuskan kepada apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mengembangkan inovasi *technopark* tersebut seperti dalam pengembangan ekosistem inovasi dan *technopreneur* yang meliputi : a) Pelaksanaan review dan implementasi dokumen masterplan kawasan *technopark* benih dalam rangka peningkatan kapasitas inovatif di Kabupaten Bantaeng. b) Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM perbenihan, sertifikasi dan pemantauan peredaran benih antar daerah. c) Melakukan justifikasi ilmiah mengenai sektor-sektor ekonomi potensial dan melakukan desain logo sebagai identitas bagi kawasan *technopark*. d) Memperkuat fungsi kelembagaan pusat

inovasi agar mampu berperan secara optimal dalam memberikan pendampingan kepada dunia usaha di Kabupaten Bantaeng.

Kegiatan produksi tentunya menghasilkan sebuah produk kemudian produk tersebut dilepas untuk dikomersilkan. Tentu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatur dan melakukan pengawasan mulai dari proses produksi sampai terciptanya produk. Selain itu, dalam hal produksi harus menciptakan keberagaman produk berupa bibit yang telah diberikan oleh pemerintah baik berupa benih padi maupun ikan sesuai dengan nawacita yang telah dikeluarkan untuk menjadikan technopark Bantaeng sebagai penghasil benih yang unggul.

Dalam konteks komersialisasi terhadap produk yang dihasilkan oleh *technopark* tidak terlepas dari dana untuk keperluan produksi yang kemudian dikomersilkan. Dalam hal ini maka pemerintah berperan untuk mengenalkan produk yang telah dihasilkan agar masyarakat dapat mengetahui produk apa saja yang dihasilkan dalam pengembangan inovasi technopark Bantaeng.

Peran pemerintah dalam pengembangan, produksi dan komersialisasi hasil inovasi technopark Bantaeng dilakukan dengan pemberian modal dengan beberapa tahap melihat dari hasil pendataan dan peninjauan usaha yang telah berdiri yang dapat memberikan dampak bagi usaha baru yang akan dikembangkan nantinya. Adapun modal yang diberikan bagi pengusaha pemula dan keluarga yang masuk kriteria penerima bantuan modal akan diberikan modal awal sebanyak 5-75 Juta. Pemberian modal dilakukan oleh pihak PMD dengan memanggil perwakilan setiap dusun RT/RW. Dalam pengembangan inovasi program ini pemerintah melakukan pendampingan langsung dari awal pemberian modal hingga usaha tersebut berkembang dan menghasilkan produk. Hasil produksi dari program tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat. Karena termasuk program baru, hasil inovasi program ini baru dimulai pada bulan maret dan telah berjalan selama 2 tahun terakhir dan merupakan program baru yang

berkelanjutan dari program dari bupati sebelumnya.

Pembelajaran TIK

TIK ada salah satu industri prioritas yang sedang dikembangkan oleh pemerintah untuk kebutuhan akan adanya TIK atau ICT Technopark sebagai inkubator bisnis agar dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat sehingga diperlukan *framework* yang menjadi acuan dalam pengembangan technopark yang meliputi *outcome*, tujuan, strategi dan pengukuran kinerja. Dengan adanya technopark Bantaeng maka pemerintah daerah dengan tujuan menjadikan Kabupaten Bantaeng sebagai pusat benih unggul melakukan beberapa langkah strategi dalam menjalankan technopark seperti: a) Dinas Pertanian yang berfokus pada penerapan teknologi dengan pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. b) Dinas Koperasi dan Perdagangan menciptakan pangsa pasar dengan hasil yang dikelola kemudian dipasarkan melalui alfa sesuai proses serta membuat suatu program inovasi dengan pemberian modal kepada pengusaha pemula atau keluarga yang berada pada status menengah ke bawah. c) Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja yang berfokus pada bidang penyediaan pupuk dengan pabrik mesin yang telah diberikan oleh pihak PPT yang telah di sumbangkan d) Dinas Perikanan dan Kelautan yang berfokus pada balai benih ikan pada bagian pengolahan dengan sistem pelayanan terbuka bagi siapa saja yang menginginkan bibit ikan unggul maka akan diberikan sesuai dengan keinginan.

Penciptaan Pasar dan Regulasi

Dalam pengembangan technopark diperlukan suatu wadah untuk memasarkan produk salah satunya adalah pasar. Penciptaan pasar merupakan bagian dari sistem untuk melakukan transaksi dan pengenalan produk ke produsen. Selain penciptaan pasar secara langsung, pemerintah juga menerapkan pasar secara online atau dengan kata lain pemasarannya melalui daring. Tak hanya itu,

pihak Balai Benih Ikan yang dinaungi langsung oleh Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai wadah pembenihan dan pengembangan khusus benih ikan unggulan juga menciptakan pasar sendiri dengan pelayanan terbuka. Dalam pengembangan inovasi *technopark* juga memerlukan beberapa regulasi yang tepat agar pengembangan inovasi yang berbasis digital dapat berjalan dengan baik dan terarah Hasil wawancara tersebut sejalan dengan keberadaan *technopark* yang awalnya muncul pada masa kepemimpinan bapak Nurdin Abdullah sebagai Bupati Bantaeng namun hanya sampai tahun 2019 karena pergantian kepemimpinan bupati baru yang dimana pada saat itu bapak Ilham Azikin yang menggantikan beliau sebagai Bupati terpilih. *Technopark* Bantaeng sendiri merupakan salah satu program dari BPPT yang bekerjasama dengan Pemkab Bantaeng telah melakukan penandatanganan perjanjian addendum di kantor Bupati bantaeng, selain itu BPPT juga mengeluarkan SK Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 206 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tim Pelaksana Pekerjaan Sistem Tata Kerja Kerekayasaan Program Pengembangan *Technopark* di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015.

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap peran pemerintah dalam pengembangan inovasi *technopark* di Kabupaten Bantaeng berdasarkan model pengembangan *Quadrupel Helix* yaitu:

Pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif bagi semua masyarakat serta semua urusan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melaksanakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negaranya sendiri. Dalam pengembangan inovasi *technopark* Bantaeng pemerintah memiliki beberapa fokus seperti membuat kebijakan, mendeteksi kebutuhan dan solusi, fokus pada pengembangan produksi, komersialisasi, pembelajaran TIK, penciptaan pasar dan regulasi. Dalam *technopark* Bantaeng

terdapat beberapa stakeholder yang terlibat dalam pengembangan inovasi khususnya dalam pemerintahan seperti dinas atau badan yang terlibat yaitu: a) Dinas Pertanian b) Dinas Koperasi dan Perdagangan, c) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, d) Dinas Perikanan dan Kelautan, e) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Industri

Industri adalah bagian dari model *quadrupel helix* yang harus ada dalam *technopark* karna industri merupakan penyedia kebutuhan dalam pengembangan sebuah inovasi daerah. Untuk industri sendiri di Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja pada *technopark* bantaeng memegang perana untuk mengolah pupuk organik. Dalam pengadaannya telah dibantu dengan adanya mesin yang diberikan oleh pihak PPT yang telah disumbangkan dan berusaha untuk dijalankan namun dengan beberapa pertimbangan karna diperlukan beberapa support dari pemerintah dari sisi ekonomis seperti suport dari pemerintah daerah untuk menjalankan biaya operasional yang banyak dengan APBD yang kecil sehingga mengalami keterbatasan sehingga sampai sekarang belum dapat berjalan dengan baik. Pengadaan pupuk SRF organik sebenarnya telah ada sejak tahun 2015 sampai sekarang namun belum berjalan maksimal karna untuk memproduksi pupuk adalah hal cukup besar. Itulah mengapa dalam beberapa tahun terakhir pengadaan pupuk tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Universitas (*academia*)

Keberadaan universitas dalam pengembangan inovasi *technopark* berfungsi sebagai pusat dari aktivitas pengembangan berbasis riset. Di Kabupaten Bantaeng terdapat Akademi Komunitas Industri Manufaktur (AK-Manufaktur Bantaeng) merupakan pendidikan tinggi vokasi industri manufaktur yang berada dinaungi Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli manufaktur yang berkompeten bagi dunia

industri yang membutuhkan khususnya industri manufaktur wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Pendidikan Manufaktur Bantaeng merupakan program Diploma II dimana setiap mahasiswa harus menyelesaikan 100 SKS dalam waktu 4 semester dengan sistem Blok. Namun pada kenyataan di lapangan technopark Bantaeng masih bekerjasama dengan universitas Hasanuddin Makasar dalam melakukan pengembangan yang berbasis riset, sebelumnya telah diwacanakan untuk membuat technopark Banateng menjadi satu kesatuan dalam lokasi namun terkendala dalam pembiayaan pemerintah daerah sehingga kami ambil alih dijadikan kampus. Meski telah ada kampusnya namun belum memadai untuk melakukan aktivitas pengembangan berbagai riset.

Masyarakat

Dalam model *quadrupel helix*, salah satu indikator yang membuat model ini berbeda dari sebelumnya yaitu dengan hadirnya masyarakat atau komunitas sebagai fasilitator dalam pengembangan technopark Bantaeng yang bertujuan untuk saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut dengan berbasis pada sumber daya yang dimilikinya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan inovasi technopark ini diharapkan mampu membawa daerah masing-masing menjadikan daerah yang tidak tertinggal dan melek dengan inovasi baru dengan basis teknologi yang telah memadai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Peran Pemerintah dalam Pengembangan Inovasi Technopark di Kabupaten Bantaeng maka dapat dilihat bahwa peranan pemerintah dijelaskan beberapa poin yaitu : 1) Pemenuhan kebutuhan dan solusi oleh pemerintah telah dilakukan dengan pengadaan berbagai bahan dan alat seperti pada Dinas Pertanian dengan pengadaan benih dan pupuk SRF, Dinas Koperasi dan Perdagangan dengan program

Pemberian dana bagi UKM masyarakat yang memenuhi kriteria dan telah menghasilkan produk yang telah dipasarkan, Dinas Perindag dengan pengolahan bahan pupuk organik namun mengalami beberapa kendala karena kurangnya SDM dan APBD yang tidak cukup untuk dialihkan, Dinas Perikanan dan Kelautan yang berfokus pada penyemaian benih ikan yang ada di Balai Benih Ikan Rappoa, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah melakukan perencanaan jangka panjang untuk pengembangan inovasi technopark di Kabupaten Bantaeng. 2) Pengembangan produksi dan komersialisasi telah dilakukan dengan baik salah satunya dengan adanya produk yang dikeluarkan oleh UKM yang dibina langsung oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan melalui pendampingan oleh pihak yang telah diberikan wewenang yang kemudian hasilnya dikomersilkan di alfamart melalui perjanjian kerjasama. Pembelajaran TIK sebagai suatu acuan pengembangan inkubator bisnis telah diterapkan sebagaimana mestinya sehingga pada penciptaan pangsa pasar dan regulasi juga telah jelas dimana sebagian dari dinas terkait menerapkan pasar yang terbuka dan online serta bekerjasama dengan alfamart yang ada di Kabupaten Bantaeng. *Technopark* Bantaeng menerapkan sistem *Quadruple Helix* dalam pengembangan inovasi dimana menyangkut 4 poin yang penting di dalamnya yaitu pemerintah, academia, industri dan masyarakat.

5. REFERENSI

- Bappenas. (2015). *Pedoman Perencanaan Technopark dan Science Park tahun 2015-2019*. Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Barton, (2000). *Intermediate Public Economics*. MIT Press Book
- Haerani, (27 April 2015). *Pembangunan Technopark untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Media center. Diperoleh Dari [Http://www.artikel-opiniku.blogspot.com](http://www.artikel-opiniku.blogspot.com). .

- Meutia, I. F (2017). *Peningkatan Potensi Daerah Melalui Inovasi Technopark di Provinsi Lampung. Dalam Editor Bayu Sujadmiko & Agustina Pratiwi. Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat yang Berkeadilan. Vol 1 hlm 85-95. Bandar Lampung.*
- Pranadjaja, Muhammad Rohidin (2003). *Hubungan Antar Lembaga Pemerintah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka*
- Pranadjaja, M. R (2003) *Hubungan Antara Lembaga Pemerintahan. Jakarta. Sinar Grafika.*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung. Alfabeta*
- Suwarno, (2008). *Inovasi di Sektor Publik. STIA. LAN Press: Jakarta.*
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara*
- Tolinggi dkk. (2018). *Agro Science Techno Park (Kajian Rintisan Kawasan). Gorontalo. Ideas Publishing*